BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km², di mana 95% nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah meliputi Utara dengan Vietnam dan Kamboja, Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat (www.kepriprov.go.id).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kepri adalah sebanyak 1.917.451 jiwa. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 1.973.043 jiwa, ditahun 2016 jumlah penduduk Kepri juga mengalami peningkatan yaitu mencapai 2.2028.169 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya bertambah hal ini tentu saja menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Selanjutnya, ketika mereka memasuki usia kerja, kebutuhan akan kesempatan kerja juga meningkat. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, kelompok tersebut akan menjadi pengangguran yang pada gilirannya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial mereka. Beni (Noveria, 2011: 6-7) menyatakan peningkatan jumlah penduduk menimbulkan beban untuk penyedia layanan sosial dan ekonomi yang tidak terpenuhi akan menjadi ancaman terhadap pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula diperlukan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan ekonomi seperti pasar, termasuk kesempatan kerja. Selanjutnya, jumlah penduduk yang meningkat juga berakibat pada peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur, seperti jalan raya, untuk menunjang pergerakan orang dan barang.

Menurut Malthus (Putro & dkk, 2014: 8) bahwa cara untuk menghindari dari malapetaka adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang Malthus tawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah jumlah anak. Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai Pembatasan Moral.

Apabila masalah ini tidak diselesaikan maka kesejahteraan masyarakat akan sangat mengkhawatirkan, peran pemerintah sangat penting dalam menangani masalah ini guna mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk (BKKBN, 2017:48) yang meningkat akan menyebabkan pemerintah

menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan negara.

Pemerintah terus berupaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan salah satu program yaitu program keluarga berencana (KB). Dalam (Sukeni, 2009:128) program KB ini diterapkan mulai dari tingkat keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat atau negara. Apabila kesejahteraan sudah dinikmati oleh masing-masing keluarga, maka secara otomatis kesejahteraan juga akan dicapai oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, maka pengendalian pertumbuhan penduduk, dimulai dari tingkat keluarga dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, yakni program keluarga berencana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Selanjutnya, pada pasal 53 ayat (1), disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (BKKBN, 2017:2).

Adapun tugas dan fungsi dijelaskan (BKKBN, 2017:10) untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 56. Program Keluarga Berencana (Mulyadi, 2016:5) bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan program keluarga berencana di Kota Batam, peran BKKBN sangat diperlukan dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Salah satu upaya untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk adalah melalui pengendalian tingkat kelahiran, upaya pengendalian kelahiran ini dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB).

Berikut adalah jumlah penduduk dari tahun 2012-2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.1. Data Pertumbuhan Penduduk Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2012	1.047.534 jiwa
2	2013	1.094.623 jiwa
3	2014	1.141.816 jiwa
4	2015	1.188.985 jiwa
5	2016	1.236.399 jiwa

(Sumber : kepri.bps.go.id)

Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan jumlah penduduk yang semakin bertambah, hal ini akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduk Kota Batam. Kota Batam atau biasanya sering disebut dengan kota industri ini memiliki

jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, walaupun disebut dengan kota industri tetapi angka pengangguran di Kota Batam juga masih cukup tinggi hal ini terjadi karena kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan dan banyaknya perusahaan yang gulung tikar.

Tabel 1.2. Data Pengangguran Kota Batam

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
2013	817.196	558.706	258.490	521.081	37.625
2014	795.333	537.914	257.419	502.179	35.735
2015	827191	558.038	269.153	524.046	33.992

(Sumber : *kepri.bps.go.id*)

“Batam masih tetap menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara, lowongan kerja makin terbatas. Belum lagi serbuan tenaga kerja asing. Pengangguran kini hantui Batam. Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Batam ini juga mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan di Batam kian diperparah dengan banyaknya perusahaan yang tutup setiap tahunnya. Pada 2014 terdapat 37 perusahaan tutup, 2015 ada 54 perusahaan, dan 2016 meningkat menjadi 62 perusahaan. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi angkatan kerja di Batam. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, pada tahun 2015 terdapat 1.033.070 penduduk Batam, jumlah ini meningkat menjadi 1.055.040 pada tahun 2016” (*batam.tribunnews.com*).

Dilihat dari data yang peneliti paparkan bahwa jumlah pengangguran tidak bertambah di tahun 2013-2015, tetapi angka pengangguran masih terbilang cukup

tinggi. Masalah pengangguran tersebut mengakibatkan tingginya angka kriminalitas yang akhir-akhir ini sering terjadi di Kota Batam, seperti pencurian, perampokan, begal, pemerkosaan, dan lain-lain. Maka dari itu pemerintah Kota Batam melaksanakan program keluarga berencana melalui BKKBN guna mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

Suksesnya program keluarga berencana ini, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan secara mantap. Program Keluarga Berencana ini diterapkan dan dilaksanakan dalam rangka usaha pemerintah untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan membangun manusia yang berkualitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosa Pasrah S.D, Tri Sukirno Putro, dan Toti Indrawati dengan judul Efektivitas Program keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyaknya masalah. Program keluarga berencana merupakan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Program keluarga berencana dilakukan dengan beberapa cara yakni Penundaan Pernikahan Usia Dini, dan Penggunaan Alat Kontrasepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota

Pekanbaru dapat dikatakan belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan hal ini ditandai oleh tetap terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan angka kelahiran bayi. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh (Putro & dkk, 2014) adalah penelitian yang dilakukan Putro dkk membahas tentang efektivitas program KB di Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan membahas tentang pengimplementasian program KB di Kota Batam.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengontrol Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Mengontrol Pertumbuhan Penduduk di Kota Batam?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program keluarga berencana dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, melalui penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu tentang pengimplementasian program keluarga berencana dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, sumbangsih pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Batam dalam mengontrol pertumbuhan penduduk di Kota Batam melalui kebijakan program keluarga berencana. Bermanfaat untuk BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan lagi program-program KB guna lebih menekan angka kelahiran di Kota Batam.